



GUNTINGAN BERITA

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : **Rabu** Tanggal : **10** Bulan : **JUNI** Tahun : **2015**

MEDIA :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,
2, 4, 6, 8, **10**, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

Abnon Jakpus 2015 Dituntut Mampu Cegah Budaya Asing

Jakarta, HanTer - Dede Januardi Lie dan Muthia Khanza terpilih menjadi Abang dan None Jakarta Pusat 2015. Ajang pemilihan dilaksanakan Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta Pusat dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kota Jakarta ke 488.

Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede menyatakan Abang dan None (Abnon) selain dituntut untuk mengenal dan mencintai kebudayaan Betawi, juga harus bisa memperkokoh jati diri generasi muda dalam menghadapi pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.

"Harus mampu mencegah masuknya budaya asing yang merusak moral dan jati diri bangsa kita," ujar Mangara di kantornya, Selasa (9/5/2015).

Sebanyak 30 finalis menunjukkan potensi terbaiknya untuk memper rebutkan gelar juara yaitu Abang dan None, Wakil I, Wakil II, Harapan I, Harapan II dan Favorit, selain itu para finalis dinilai berdasarkan tiga kriteria yaitu Beauty, Brain dan Behaviour.

Pemilihan Abnon Jakpus mendapat animo yang cukup baik dari para generasi muda. Sekitar 163 peserta yang mendaftarkan diri menjadi finalis, terdiri dari 47 Abang dan 116 None.

■ Sammy



GUNTINGAN BERITA

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : **Rabu** Tanggal : **10** Bulan : **JUNI** Tahun : **2015**

MEDIA :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,
2, 4, **6**, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

Target ZIS Jakpus Rp 13 Miliar

JAKARTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat (Jakpus) menargetkan bisa mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) senilai Rp 13 miliar pada tahun ini. Untuk mencapai target tersebut, Pemkot Jakpus bekerja sama dengan Badan Amal Zakat Infaq dan Sadaqoh (BAZIS); akan mengefektifkan kembali kegiatan MAP Gerakan Amal Ramadhan (MAP GAR) yang biasa digelar menyambut Ramadhan.

Melalui kegiatan MAP GAR, pengumpulan ZIS dilakukan dengan cara jemput bola, yakni mengedarkan MAP GAR ke setiap RT/RW ataupun sekolah-sekolah di wilayah Jakpus. "Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi target ZIS Kota Administrasi Jakpus untuk tahun ini senilai Rp 13 miliar," ujar

Wakil Wali Kota Jakpus, Arifin, ketika menyerahkan Map GAR di kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Selasa (9/6).

Tahun lalu, perolehan MAP GAR mencapai Rp 1,6 miliar lebih. "Mudah-mudahan, tahun ini perolehan MAP GAR akan lebih meningkat lagi," harapnya.

Menurut Arifin, amal ibadah umat Islam saat Ramadhan lebih meningkat. "Untuk itu, sangat tepat penyaluran MAP GAR ini saat Ramadhan," katanya.

Arifin juga mengimbau masyarakat tak perlu ragu menyerahkan ZIS melalui BAZIS. Semua hasilnya dikembalikan kepada yang berhak menerima dan dapat dipertanggungjawabkan dunia-akhirat.

"Semua penerimaan dan penyaluran ZIS untuk me-

reka yang berhak menerima, tak mungkin diselewengkan karena diaudit melalui akuntan publik," tutur Arifin menegaskan.

Kepala BAZIS Jakpus, Nurzam mengatakan, seluruh uang yang terkumpul melalui BAZIS dikembalikan lagi kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti fakir miskin, bantuan biaya pendidikan, madrasah aliah/SILTA swasta, mahasiswa, beasiswa santri, dan pondok duafa. Selain itu, untuk meringankan beban hidup, bantuan keagamaan, muafat Ibnussabil, bantuan lembaga keagamaan, bantuan kemaslahatan umat.

"Sampai akhir Mei 2015, baru terkumpul Rp 2 miliar lebih dari target Rp 13 miliar," ucapnya. (Moh Ridwan)



GUNTINGAN BERITA

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : **Rabu** Tanggal : **10** Bulan : **JUNI** Tahun : **2015**

MEDIA :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

250 Lansia Peroleh Bantuan Sembako

SAWAH BESAR (Pos Kota) - Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2015, diselenggarakan Suku Dinas (Sudin) Sosial Jakarta Pusat, dengan memberikan bantuan paket sembako kepada 250 lansia di Rusun Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Selasa (9/6).

Kegiatan yang dihadiri Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede tersebut

bertujuan untuk menghormati dan memberikan kesempatan kepada lansia guna mengaktualiasasi diri dan kemampuannya dalam berbagai aspek kehidupan.

"Tapi, saya berharap perhatian terhadap para lansia ini tidak sekadar pada hari besar saja. Karena itu, seluruh jajaran diminta ikut untuk memperhatikan lansia terlebih bagi mereka

yang hidupnya kurang beruntung," ucap Mangara.

Kepala Sudin Sosial Jakarta Pusat, Susana Budi Susilowati mengatakan, bantuan yang diberikan sebagai bentuk perhatian Pemerintah Kota Jakarta Pusat dalam memenuhi kebutuhan dasar. "Selain paket sembako, kami juga beri kursi roda dan alat dengar," ujarnya. (deny/st)



GUNTINGAN BERITA

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : **Rabu**

Tanggal : **10**

Bulan : **JUNI**

Tahun : **2015**

MEDIA :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,

Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

Arifin Gerakan Amal Ramadan

Menyambut bulan suci Ramadan 1436 H, Badan Amal Zakat Infaq dan Sadaqoh (BAZIS) Jakarta Pusat distribusikan 6.000 Map Gerakan Amal Ramadan (Map GAR) yang akan dibagikan ke setiap RT dan RW ataupun sekolah-sekolah di wilayah Jakarta Pusat.

"Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi target ZIS Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk tahun 2015 ini sebesar Rp 13 miliar," ujar Wakil Walikota Jakarta Pusat, Arifin. Selasa (9/6), ketika menyerahkan Map GAR di kantor Walikota Jakarta Pusat.

Tahun 2014 lalu, kata Arifin, perolehan Map GAR mencapai Rp 1,6 miliar lebih. "Mudah-mudahan tahun ini, perolehannya lebih meningkat lagi," ujarnya.

Wakil Walikota mengimbau kepada masyarakat, tak perlu ragu menyerahkan ZIS melalui Bazis. Karena semua hasilnya dikembalikan kepada yang berhak menerima dan dapat dipertanggungjawabkan dunia akhirat. (ito)



Warta Kota/2015



GUNTINGAN BERITA
PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : **Rabu** Tanggal : **10** Bulan : **JUNI** Tahun : **2015**

MEDIA :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,
 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, **Kolom :** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

Jelang Ramadhan Pengawasan Ditingkatkan Petugas Nyamar Pembeli Gas 3 Kg

GAMBIR (Pos Kota) – Menjelang Ramadhan, pengawasan penjualan harga eceran tertinggi (HET) gas elpiji ukuran 3 Kg dan 12 Kg terhadap pemilik pangkalan ditingkatkan petugas Sudin Perindustrian dan Energi Jakarta Pusat, Selasa (9/6).

Malah dalam pengawasannya petugas sampai menyamar menjadi pembeli. "Karena kalau petugas berseragam tidak menyamar mana mungkin bisa menemukan yang

akurat," ucap Kepala Sudin Perindustrian dan Energi Jakarta Pusat, Syaukani.

Tingginya kebutuhan penggunaan gas elpiji pada saat Ramadhan cenderung tidak menutup kemungkinan dimanfaatkan sebagian pemilik pangkalan untuk menaikkan harga. "Memang bisa saja terjadi, tapi kami berharap pemilik pangkalan tidak melakukan," ucapnya.

Syaukani mengatakan, sampai saat ini petugas

tidak mendapati adanya agen dan pemilik pangkalan gas elpiji yang menjual di atas HET.

"Mereka menjual sesuai dengan ketentuan dengan harga Rp16 ribu untuk ukuran 3 Kg," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Walikota Jakarta Pusat, Arifin saat sosialisasi seputar HET gas elpiji belum lama ini mengancam mencabut izin usaha bagi pemilik agen dan pangkalan yang kedapatan menjual di atas harga tersebut. (deny/st)



GUNTINGAN BERITA

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : **Rabu**

Tanggal : **10**

Bulan : **JUNI**

Tahun : **2015**

MEDIA :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,

Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

Awas, Halau PMKS Sudin Sosial Jakpus Tebar 50 Petugas

NONSTOP, JARING-Menjelang bulan Ramadhan, dan hari raya Idul Fitri Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat akan memperketat para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) berkeliaran di wilayah Jakarta Pusat. Apalagi, Jakarta Pusat adalah daerah pusat pemerintahan dan ekonomi, sehingga untuk mengantisipasi berkeliaran para PMKS maka Sudin Sosial Jakarta Pusat akan menyebar 50 petugas Sudin Sosial.

"Kami akan menyebar 50 orang petugas, dan tentunya akan berkoordinasi dengan instansi terkait Satpol PP dan aparat keamanan," ungkap Kasudin Sosial Jakarta Pusat Susana Budi Susilowati, Selasa (9/6).

Dia mengatakan, instansinya akan memperketat masuknya para pengemis, anak punk, pengamen berpakaian badut, bencong, dan pengemis lainnya ke Jakarta, dengan mengawasi terminal, pasar, dan jalan.

Menurut Susana, dengan menyebar 50 petugas Sudin Sosial Jakarta Pusat maka dapat

menertibkan para PMKS yang berasal dari luar Jakarta masuk ke Jakarta Pusat. "Bila tertangkap maka kami akan bawa ke Panti Sosial di Jakarta Timur dan Jakarta Barat," tambahnya.

Dia menegaskan, beberapa titik harus bebas dari PMKS, yakni di depan Istana Negara, Jalan Baru, Karet Bivak, bundaran Hotel Indonesia, Imam Bonjol. "Dan juga di Terminal Senen dan perempatan Coca-cola Cempaka Putih, Jakarta Pusat," tambahnya.

Susana mengakui, para PMKS akan ramai mengais rejeki sekitar dua minggu menjelang perayaan Idul Fitri. Namun, lanjut Susana, jika para PMKS yang pernah tertangkap sebelumnya maka akan dijerat kejahatan kriminal, dengan Pasal Penipuan.

"Tetap bagi mereka yang pernah terjaring akan dikenakan sanksi, dan sudah termasuk penipuan dan ini sudah kriminal, dan kita akan koordinasi dengan pihak kepolisian," tutur Susana. (RAM)



GUNTINGAN BERITA

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : Rabu Tanggal : 10 Bulan : JUNI Tahun : 2015

MEDIA :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,

Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Penghuni Rusun Karang Anyar Protes Fasilitas Kurang Memadai

Jakarta, SENTANA

WARGA Rukun Warga RW 012, penghuni Rumah Susun (Rusun) Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, mengeluhkan pengelola Rusun. Pasalnya, fasilitas seperti Taman, Jalan, Halaman serta Gedung Rusun yang tidak layak lagi jadi hunian.

Keluhan warga tersebut dihimpun Harian Sentana 9/6, saat walikota Jakarta Pusat Mangara Pardede memberikan bantuan terhadap kaum Lanjut Usia (Lansia) di kompleks Rusun Karang Anyar, Selas (9/6).

Melihat fisik bangunan gedung Rusun Karang Anyar, sejumlah pejabat Pemerintah Kota Jakarta Pusat, yang hadir dalam acara Hari Lansia tersebut, membenarkan keluhan warga dimana gedung Rusun kelihatan kusam bahkan cat tembok gedung lumutan, demikian keterangan salah seorang pejabat Sudin Perumahan dan Gedung Jakarta Pusat, menyikapi keluhan warga.

Menurut warga, "Rusun Karang Anyar dibangun sekitar tahun 1987 dan tahun 1989 dibangun dua tahap, namu terkesan tidak ada perawatan sehingga fasilitas tidak layak alais kumuh, sementara saluran air mampat sehingga tergenang tidak berfungsi. Warga mengharapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperhatikan keluhan warga Karang Anyar, dengan memperbaiki fasilitas Rusun" ujarnya. ■TS



Hari : **Rabu** Tanggal : **10** Bulan : **JUNI** Tahun : **2015**

MEDIA :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, **25**, 27, 29, 31,
 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Rp 60 Juta Per Meter, Gila



Jangan sampai ada oknum pedagang yang pura-pura menyewa kios, nanti malah jual-beli kios. Kami enggak mau seperti itu."

Djarot Saiful Hidayat, wakil gubernur DKI

Biaya Sewa Kios Pasar Senen

GAMBIR - Pedagang Pasar Senen kecewa dengan rencana revitalisasi yang tidak kunjung selesai. Apalagi pemprov berencana menaikan biaya sewa kios tinggi setelah Pasar Senen selesai diperbaiki.

Ketua Paguyuban Pedagang Blok VI Pasar Senen Tambun Tambunan menjelaskan, para pedagang kecewa karena revitalisasi Blok III dan Blok VI Pasar Senen baru dimulai tuh. Padahal belum ada kesepakatan biaya sewa kios antara pedagang dan PD Pasar Jaya.

Menurut Tambun, PD Pasar Jaya mematok harga sewa kios Rp 60 juta per meter persegi. Karena itu, pedagang berharap biaya sewa dibicarakan dua pihak dan tidak ditentukan PD Pasar Jaya. Alasannya, ada Perda No 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Area Pasar yang mengatur bahwa rencana bangunan, penempatan pedagang, dan harga tempat usaha harus disetujui minimal 60 persen pedagang *existing* dengan pernyataan tertulis.

"Hingga sekarang, kami belum menyepakati hal itu. Siapa sih yang tidak ingin tempat jualannya bagus? Tetapi, kalau harga sewanya selangit, kami juga akan rugi," katanya.

Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat meniadakan biaya sewa Rp 60 juta per meter tersebut murah. Sebab, biaya sewa itu digunakan selama 20 tahun. Jika pedagang

tidak mampu membayar biaya sewa, pemprov berjanji memberikan bantuan. Syaratnya, mereka betul-betul pedagang resmi di Pasar Senen. "Jangan sampai ada oknum pedagang yang pura-pura menyewa kios, nanti malah jual-beli kios. Kami enggak mau seperti itu," tegasnya.

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta berencana membangun 12 flat di atas pasar di Jakarta. Program penghilangan kawasan kumuh sekaligus revitalisasi pasar tradisional tersebut akan menjadi andalan tahun depan. "Kami sudah menyiapkan 12 flat yang terintegrasi dengan pasar," kata Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam seminar *New Cities Summit* di Ciputra Artpreneur, Kuningan, kemarin (9/6).

Nanti, setiap flat berukuran 30 meter persegi. Menurut dia, bagian bawah flat akan digunakan para PKL yang ditempatkan ke pasar tradisional berdasar tema tertentu. Para pedagang pasar akan menghuni flat tersebut. "Kalau orang punya rumah dan tempat usaha, dia akan kaya. Ini adalah subsidi pemerintah, bukan uang, tetapi tempat usaha," katanya.

Dia menjelaskan, proyek tersebut terinspirasi pembangunan hotel yang di bawahnya dibangun pusat perbelanjaan. Misalnya, Lotte Avenue yang dibangun Ciputra Grup. "Kalau swasta bisa, mengapa pemerintah tidak bisa?" katanya. Namun, pihaknya mengakui

bahwa inovasi tersebut tertunda karena selalu terganjal aturan. Penggunaan tanah negara untuk hunian berpotensi membuat mantan bupati Belitung Timur itu terseret kasus hukurnya.

Ahok pun selalu ditakut-takuti bagian hukum Pemprov DKI Jakarta setiap kali hendak membuat terobosan. "Jangan sampai saya masuk penjara setelah tidak menjabat," katanya. (fat/del/co2/noe)



GUNTINGAN BERITA
PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : **Rabu** Tanggal : **10** Bulan : **JUNI** Tahun : **2015**

MEDIA :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,
 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

**Aspirasi
Warga Jakarta**



**Kirim SMS Bisa Berikut Foto
Ke 0813 8505 1009**

atau telepon langsung redaksi (021) 638 51729
 foto kirim ke e-mail: poskotawarga@gmail.com

Tertibkan PKL Harus Adil

○ Yth. Bapak Gubernur DKI Jakarta, saya melihat tentang penertiban PKL yang ada di trotoar Tanah Abang saya salut dengan pak Ahok tapi saya minta adil dong lihat semua trotoar jangan cuma Tanah Abang lihat di depan Rusunami Bandar Kemayoran trotoar habis dengan pedagang kaki lima, jalan dipakai parkir mobil sampai 3 baris sampai kami yang pejalan kaki bingung jalan karena penuh dengan parkir dan PKL. Terima kasih. (08122393xxx)



GUNTINGAN BERITA
PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : **Rabu** Tanggal : **10** Bulan : **JUNI** Tahun : **2015**

MEDIA :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,
 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

12 Rusunawa Segera Dibangun

JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana membangun sebanyak 12 rumah susun sederhana sewa (rusunawa) terpadu pada 2016. Semuanya tersebar di wilayah Ibu Kota.

"Sebetulnya kita mau mulai pada tahun ini. Namun, karena terbentur salah satu aturan, pembangunannya kita undur jadi tahun depan," kata Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (9/6).

Menurut pria yang lebih akrab disapa Ahok sehari-hari itu, pihaknya menemui hambatan, yakni belum adanya aturan yang memperbolehkan pihak pemerintahan untuk membangun hunian warga. Hal ini dinilai akan mempersulit proses pembangunan.

Gubernur merasa heran, selama ini ada aturan yang memperbolehkan pihak swasta membangun hunian yang bercampur dengan pusat perbelanjaan dan perkantoran. Akan tetapi, belum ada aturan serupa bagi pemerintahan. Pihaknya harus menunggu hingga dikeluarkannya payung hukum terkait sebelum seluruh rusunawa itu mulai dibangun pada tahun depan.

Konsep rusunawa terpadu yang ingin dibangun menurutnya mirip dengan yang pernah dibangun pihak swasta. Hanya, yang dibangun ini adalah rusunawa, bukan rusunami (rumah susun sederhana milik). "Jadi, tidak bisa dibeli dan jadi hak milik, cuma bisa disewa," ujar Ahok.

Selain itu, dia mengungkapkan perbedaan lainnya, jika hunian swasta dilengkapi dengan pusat perbelanjaan berupa mal, rusunawa milik pemerintah akan dilengkapi dengan pasar rakyat. Hal ini lebih menggambarkan kesederhanaan. Masyarakat kelas menengah ke bawah juga dapat mengakses pasar rakyat ini.

Pasar rakyat akan diletakkan di lantai dasar. Hal ini akan memudahkan penghuni untuk berbelanja. Pihaknya berharap keberadaan rusun terpadu ini mampu memenuhi kebutuhan hunian, terutama bagi warga yang kurang mampu.

Lokasi ke-12 rusunawa terpadu itu antara lain di Pasar Rumpit, Pasar Minggu, Pasar Sunter, Pasar Cempaka Putih, Pasar Jembatan Besi, Pasar Grogol, Pasar Serdang, Pasar Sindang, Pasar Sukapura, Pasar Jelambar Polri, Pasar Lontar Kebon Melati, dan Pasar Blok G Tanah Abang.



GUNTINGAN BERITA

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : **Rabu** Tanggal : **10** Bulan : **JUNI** Tahun : **2015**

MEDIA :	1. Indo Pos 2. Jawa Pos 3. Kompas 4. Koran Sindo 5. Koran Tempo	6. Lampu Hijau 7. Media Indonesia 8. NonStop 9. Pos Kota 10. Pelita	11. Rakyat Merdeka 12. Republika 13. Suara Karya 14. Sentana 15. Warta Kota	16. Harian Terbit 17. Sinar Harapan 18.
---------	---	---	---	---

Halaman : 1, 3, 5, 7, **9**, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,
 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

Polisi Diduga Kesulitan Tuntaskan Kasus UPS

TIDAK terdengarnya lagi penyidikan dugaan korupsi pengadaan *uninterruptible power supply* (UPS) membuat banyak orang menduga kalau Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri kesulitan mengungkap tuntas kasus tersebut.

Meski hingga kini, polisi belum memeriksa para anggota Komisi C yang membidangi anggaran di DPRD DKI periode 2009-2014 yang turut menyetujui proyek tersebut.

"Pemeriksaan perusahaan penyedia fisik UPS selama ini belum pernah diungkap ke publik. Kemudian, oknum dewan di Komisi C DPRD DKI yang diduga terkait dengan UPS juga belum pernah diperiksa. Ini bukti kasus UPS belum tuntas," ujar Amir Hamzah, pengamat kebijakan publik kepada koran ini, Selasa (9/6).

Amir mengatakan, pemeriksaan kepada perusahaan penyedia UPS sangat penting. Hal ini untuk mengetahui kualitas, harga barang, serta hal terkait lainnya. "Apalagi menurut analisis saya, perusahaan pemasok utama UPS itu belum juga diperiksa. Perusahaan lainnya hanya mengambil barang dari perusahaan ini," kata dia.

Diungkapkan Amir, selain perusahaan penyedia UPS, pihak lain yang wajib diperiksa Bareskrim adalah para anggota dewan di Komisi C DPRD DKI. "Para anggota dewan di Komisi C ini wajib diperiksa, jangan yang disidik hanya Komisi E saja, tanpa melakukan penyidikan Komisi C. Karena berhasil atau tidaknya pengajuan anggaran UPS ada di Komisi C itu," cetusnya juga.

Pertanyaan lainnya dalam proses penyidikan UPS ini, adalah tidak diperbolehkannya kawan-kawan dari Alex Usman menjenguk yang bersangkutan di tahanan Bareskrim Mabes Polri. Diduga, ada pihak-pihak tertentu yang

tidak Alex Usman berbicara kepada pihak luar dan mengungkap ke publik siapa-siapa saja yang terlibat kasus itu.

"Kawan-kawan Alex Usman sampai saat ini tidak boleh menjenguk. Ini kan aneh. Saya menduga ada yang takut Alex Usman bernyanyi dan menyebut pihak-pihak yang terlibat kepada orang luar, khususnya media," paparnya lagi.

Sementara itu, dalam beberapa kesempatan, pihak Bareskrim Polri mengungkapkan telah memeriksa perusahaan-perusahaan yang terkait UPS. Diantaranya adalah Direktur PT OA bertulis HL.

Direktur Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Wiyagus mengungkapkan pihaknya memang memeriksa Direktur PT OA berinisial HL, Rabu (15/4) lalu. Dia juga mengatakan, pemeriksaan itu terkait tindak pidana korupsi proyek UPS. "HL diperiksa sembilan jam sebagai saksi," ujarnya.

Seperti diketahui, perusahaan HL berperan sebagai penyedia fisik UPS dalam proyek pengadaan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Sementara itu, Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri, Kombespol Rikwanito menyebut unsur tersangka tak hanya berasal dari eksekutif saja, melainkan dari legislatif dan pihak swasta.

Alex diduga melakukan korupsi saat menjabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan UPS di Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat dan Zaenal Soleman selaku PPK pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat.

Kedua tersangka dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP. (wok)



GUNTINGAN BERITA

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : Rabu Tanggal : 10 Bulan : JUNI Tahun : 2015

MEDIA :	1. Indo Pos 2. Jawa Pos 3. Kompas 4. Koran Sindo 5. Koran Tempo	6. Lampu Hijau 7. Media Indonesia 8. NonStop 9. Pos Kota 10. Pelita	11. Rakyat Merdeka 12. Republika 13. Suara Karya 14. Sentana 15. Warta Kota	16. Harian Terbit 17. Sinar Harapan 18.
---------	---	---	---	---

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

Calo Berkeliaran di Kelurahan

PEMBUATAN dokumen kependudukan, termasuk kartu tanda penduduk (KTP), bukan hanya menjadi lahan pungutan liar (pungli) bagi petugas kelurahan yang nakal, melainkan juga dijadikan mata pencobaan oleh sejumlah calo yang setiap hari kerja berkeliraran di sekitar kantor kelurahan.

Di kantor Kelurahan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, sejumlah calo menawarkan jasa membantu mempercepat proses pembuatan KTP dengan tarif Rp150 ribu. Salah seorang warga yang memanfaatkan kehadiran calo ialah Sumardi, warga RW 07. Ia rela menyerahkan uang sebesar itu kepada calo yang dapat memproses pembuatan KTP penggantinya yang hilang dalam satu minggu.

"KTP saya hilang. Untuk membuatnya lagi, normalnya 14 hari. Namun, melalui dia (calo), seminggu bisa selesai," katanya, pekan lalu.

Berdasarkan pengamatan, calo yang dimaksud Sumardi nampak sangat akrab dengan para petugas. Bahkan ia bisa leluasa keluar masuk ruangan administrasi, meskipun di pintu ruangan terdapat larangan masuk untuk orang yang bukan petugas pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Kelurahan Duri Kosambi.



PEMBUATAN E-KTP: Petugas kelurahan mencatat warga yang telah jadi kartu tanda penduduknya di Kelurahan Kramat, Jakarta Pusat, Senin (8/6). Pembuatan e-KTP gratis tanpa dipungut biaya karena seluruh biaya proses pembuatannya ditanggung negara.

Salah seorang calo yang ditemui *Media Indonesia* membenarkan ia bisa membantu warga untuk mengurus administrasi kependudukan. Bukan hanya e-KTP, ia juga bisa membantu mengurus pembuatan

kartu keluarga. "Imbalannya tergantung kesulitannya. (Biayanya) bisa dibicarakan. Sii mau bikin apa," ucap calo yang selalu menenteng tas hitam itu.

Usut punya usut, ternyata

tas milik calo tersebut berisi dokumen milik warga yang memakai jasanya dan formulir kependudukan yang sama persis dengan milik petugas kelurahan.

Praktik percaloan juga terjadi di Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Seperti halnya di kelurahan lain, di wilayah itu percaloan muncul karena ketidaktahuan warga tentang informasi dan prosedur membuat KTP.

Seorang petugas kelurahan menuturkan, praktik percaloan terjadi mulai dari proses memperpanjang KTP hingga pindah administrasi kependudukan. Pelakunya antara lain pengurus RT, dengan tarif Rp50 ribu hingga Rp1 juta. "Kalau di kelurahan, petugas yang berstatus PNS (pegawai negeri sipil) sudah tidak berani (jadi calo). Kalau ada yang jadi makelar, petugas honorer," ujar staf kantor kelurahan yang enggan menyebutkan nama itu.

Salah seorang warga pindah dari Kampung Talake, Kecamatan Sirimau, Ambon, Maluku Utara, Thomas Kliombor, 45, mengaku bersama tiga saudaranya dijanjikan mendapat KTP Kelurahan Kramat oleh pengurus RT tempatnya tinggal sementara. Untuk keperluan itu, ia diminta uang Rp2.450.000. (Mal/Yah/2)



GUNTINGAN BERITA

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : *Rabu* Tanggal : *10* Bulan : *JUNI* Tahun : *2015*

MEDIA : 1. Indo Pos 6. Lampu Hijau 11. Rakyat Merdeka 16. Harian Terbit
2. Jawa Pos 7. Media Indonesia 12. **Republika** 17. Sinar Harapan
3. Kompas 8. NonStop 13. Suara Karya 18.
4. Koran Sindo 9. Pos Kota 14. Sentana
5. Koran Tempo 10. Pelita 15. Warta Kota

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, **17**, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,



Razia Timbangan

Petugas Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan memeriksa timbangan pedagang di Pasar Senen, Jakarta, Selasa (9/6). Hal ini bertujuan untuk mencegah kecurangan.